

APBD DKI TURUN RP5 TRILIUN

DPRD DKI Ingatkan Bansos Masyarakat Jangan Dikurangi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2023 sebesar Rp78 triliun. Angka ini turun sebesar Rp5 triliun dibandingkan APBD 2023 yang disahkan akhir tahun lalu sebesar Rp83 triliun.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menegaskan Pemprov DKI diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap program prioritas seperti bantuan pangan murah, bantuan pendidikan atau KJP, KJMU, serta soal transportasi. Sebab, ketiga hal inilah yang menjadi kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan ya seingat saya soal kebutuhan dasar diupayakan tidak defisiensi, transportasi, pangan, pendidikan,” kata Ismail ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Awalnya, sambung Ismail, akibat penurunan kebijakan plafon APBD-P 2023 tersebut, Pemprov DKI berencana memotong subsidi TransJakarta hingga Rp1 triliun dari saat ini Rp3,9 triliun. Ia pun menentang keras hal tersebut. Ia khawatir, pemotongan subsidi sebesar itu bakal mengurangi layanan TransJakarta yang per hari sudah melayani 1 juta penumpang. “Kita sedang mendorong supaya orang naik angkutan umum. Kalau itu dilakukan maka kebijakan kita tidak ‘in line’,” tegas politikus PKS itu.

Dengan serangkaian pembahasan, akhirnya Pemprov DKI setuju hanya memotong subsidi TransJakarta Rp336 miliar berasal dari internal kegiatan perusahaan.

Ismail mengatakan, kebijakan plafon ini nantinya akan dibahas bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta. Ia pun berharap, dalam pembahasan tersebut, seluruh komisi mempertimbangkan pengeluaran

dengan kondisi penerimaan yang ada saat ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan pun menjelaskan ada beberapa sektor pendapatan yang memang tidak bisa meningkat karena bontok dengan aturan pemerintah pusat seperti kenaikan tarif parkir yang ditargetkan bisa 20% ternyata maksimal hanya bisa 10%.

Namun, menurut dia, di luar hal tersebut seharusnya Pemprov DKI bisa membuat rancangan APBD lebih baik agar tidak terjadi penurunan anggaran yang dapat berdampak pada implementasi program kepada masyarakat. Menurut dia, hal ini bakal menjadi catatan buruk bagi tim penganggaran Pemprov DKI.

“Ya tentu saja akan jadi catatan dalam rapat-rapat ke depan akan kami sampaikan. Karena bagaimana pun juga, program kepada warga sedikit banyak akan terdampak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi membenarkan adanya penurunan potensi pendapatan yang akhirnya menyurut APBD DKI di rencana perubahan ini hingga Rp5 triliun.

“Itu yang paling besar (penurunan) dari Pendapatan Lain-lain Yang Sah. Dari awalnya Rp8 triliun menjadi Rp4,2 triliun,” jelasnya.

Pengurangan pendapatan lainnya juga berasal dari pendapatan pajak yakni Rp600 miliar. Michael mengatakan, Pendapatan Lain-lain Yang Sah berasal dari jasa giro dan bunga. Awalnya kedua sektor pendapatan itu ditargetkan mencapai Rp900 miliar. Namun, ia mengatakan, dari realisasi tahun ini potensinya hanya sekitar Rp150 miliar. “Karena sedang turun, sekarang 4,5%. Kalau kita mau Rp900 miliar minimal ada saldo mengendap Rp20 triliun. Kan tidak bisa. Itu kita sesuaikan,” paparnya. ● yan

Kebakaran di Rajawali Selatan, Jakpus Pengungsi Bertambah Jadi 78 Jiwa

JAKARTA (IM) - Pengungsi kebakaran di Jalan Rajawali Selatan 1, RT 04 RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin (4/9) sore bertambah.

Dari data yang diterima kemarin, sebanyak 24 Kepala Keluarga (KK) dengan 78 jiwa harus kehilangan tempat tinggalnya karena tempat tinggalnya si lahapi si jago merah.

Dari data sementara, kebakaran tersebut terjadi karena adanya korsleting listrik dari AC di salah satu bangunan yang membuat 15 rumah ludes terbakar.

“Api bermula dari (restoran) Lestari Moon dan Apotek Bimasakti. Karena cuaca angin yang kencang jadi api ke belakang ke rumah padat penduduk,” kata Ketua RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Yoedo Arnanto saat ditemui di lokasi, Senin (4/9) malam.

Saat ini, 78 warga itu dibuatkan tenda pengungsian yang dibangun oleh BPBD dan Dinas Sosial DKI Jakarta. “Ini dibikin dua tenda yang satu dari BPBD DKI Jakarta, dan yang satunya lagi dari Dinas Sosial, melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat,” kata Lurah Gunung Sahari Utara, Hasbulloh.

Selanjutnya, 78 jiwa warga yang kehilangan tempat tinggalnya itu, diungsikan di tenda yang didirikan di depan sekretariat RW 02 Kelurahan Gunung Sahari Utara. Kemudian, kata Hasbulloh pemerintah setempat juga akan menanggung konsumsi warga terdampak kebakaran selama tiga hari kedepan untuk makan pagi, siang dan malam.

“Mudah-mudahan tadi dari Dinas Sosial tiga hari kedepan kita pasok konsumsinya, pagi, siang dan malam, toilet portabel juga nanti disiapkan juga unit dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat,” ucap Hasbulloh. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



PROGRAM KALI BERSIH TNI AL DI CILINCING

Sejumlah Prajurit TNI AL membersihkan sampah di kawasan hilir Kali Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, (5/9). TNI AL melibatkan 13.500 personel untuk melakukan Program Kali Bersih (Prokasih) 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam rangkaian HUT ke-78 TNI AL.

Dewan Dorong Pemprov DKI Audit Seluruh Rusunawa di Jakarta

Tak hanya Marunda, bangunan rusun lainnya di Jakarta juga perlu diperhatikan agar tak sama nasibnya dengan Rusunawa Marunda. “Kita akan minta Dinas Perumahan (DPRKP) melakukan audit agar bisa diantisipasi jangan sampai ada kejadian lagi dan mana rusun yang segera perlu dilakukan revitalisasi,” ujar anggota Dewan Judistira Hermawan Judistira.

JAKARTA (IM) - Insiden robohnya atap Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) menjadi pelajaran serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta diminta mengawasi kualitas bangunan rusun di seluruh Ibu Kota.

Dewan juga mendorong DPRKP DKI untuk melakukan audit di semua rusunawa milik Pemprov DKI lainnya mengantisipasi kejadian serupa ke depannya. Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI, Judistira Hermawan mengatakan, Rusunawa Marunda memang berusia 17 tahun atau sudah cukup tua, yakni dibangun

pada 2006. Dia pun mengingatkan agar rusunawa tersebut menjalani revitalisasi.

Tak hanya Marunda, menurut dia, bangunan rusun lainnya di Jakarta juga perlu diperhatikan agar tak sama nasibnya dengan Rusunawa Marunda. “Kita akan minta Dinas Perumahan (DPRKP) lakukan audit agar bisa diantisipasi jangan sampai ada kejadian lagi dan mana-mana yang segera perlu dilakukan revitalisasi,” ujar Judistira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9).

Terhadap insiden robohnya atap bangunan Rusunawa Marunda, Judistira mengaku, dewan siap mengawal dan memastikan penghuninya bisa direlokasi. Para penghuni Rusunawa Marunda yang berjumlah ratusan kepala keluarga (KK) diketahui dipindahkan ke Rusunawa Nagrak usai insiden tersebut.

“Kita prihatin robohnya atap Rusunawa Marunda, dan kepada warga Rusunawa Marunda yang terdampak sebanyak 451 KK, laporan dari Dinas Perumahan akan direlokasi ke Rusunawa Nagrak sehingga kita dari DPRD DKI akan memastikan proses relokasi ini berjalan baik sesuai kebutuhan dari warga Rusunawa Marunda,” tutur politikus Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI, Retno Sulistyaningrum mengatakan, atap atau dak beton Rusunawa Marunda roboh pada Rabu (30/8) sekitar pukul 21.10 WIB. Lokasi insiden, tepatnya di Blok C5 lokasi sekitar halaman (hall) belakang.

Retno mengemukakan, robohnya atap bangunan di Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, akibat sudah

tidak layak huni. “Sesuai hasil penelitian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak,” kata Retno saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/9).

Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II Dinas PRKP DKI, Uye Yayat Dimiyati menyebutkan, beberapa lokasi bangunan juga sudah sangat membahayakan. Uye menjelaskan, sosialisasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pada Maret 2022.

Namun sempat tertunda karena adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Rusun Nagrak sebagai tempat relokasi digunakan untuk isolasi pasien Covid-19. “Sudah dari tahun lalu kita ‘plan’ (susun), warga yang sebagian sulit dipindah. Yang sekarang lebih tegas karena mengutamakan keselamatan jiwa,” ujar Uye. ● yan

BOYONG PASUKAN BIRU KE BEKASI

BKD Proses Bentuk Sanksi Kasudin SDA Jakpus

JAKARTA (IM) - Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyatakan tak pandang bulu terkait pemberian sanksi bagi pegawai atau aparat sipil negara (ASN) yang melanggar, termasuk Kepala Suku Dinas (Kasudin) Sumber Daya Air (SDA), Mustajab. Mustajab diduga menyalahgunakan jabatan dengan memerintahkan penyedia jasa lain perorangan (PJLP) atau pasukan biru untuk membersihkan kawasan perumahannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

“Iya dong, pastinya BKD tak pandang bulu,” ujar Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya saat dihubungi, Selasa (5/9).

BKD DKI Jakarta telah menerima surat dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas SDA, Ika Agustina Ningrum terkait pemeriksaan Mustajab atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Maria mengatakan, BKD DKI Jakarta tengah menyiapkan bentuk sanksi untuk Mustajab sebelum nantinya akan diumumkan ke publik. “On process, kita tunggu ya,”

ucap Maria. Untuk diketahui, persoalan ini bermula ketika petugas PJLP Sudin SDA Jakpus dikerahkan untuk membersihkan selokan di perumahan wilayah Jatisampurna, Bekasi. Belakangan diketahui, mereka diminta untuk bertugas di wilayah kediaman pribadi Mustajab.

Tindakan itu akhirnya disorot pejabat teras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, pengurangan “Pasukan Biru” untuk membersihkan selokan di lingkungan rumah Mustajab dianggap tidak pantas.

“Di kontrak itu kan ada wilayah kerja dia (Petugas PJLP), ada jam kerjanya. Sekarang, dia ada di sana, itu kan kurang patutlah,” ujar eks Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal di Balai Kota DKI Jakarta pada 3 Juli 2023.

Yusmada mengatakan, penelusuran dugaan penyalahgunaan wewenang itu dilakukan dengan memanggil dan meminta keterangan Mustajab. Dinas SDA juga akan menggali keterangan dari petugas PJLP Sudin SDA

Jakarta Pusat yang pernah ditugaskan ke Bekasi. Hal ini untuk mengetahui secara pasti alasan para petugas bekerja di luar area kerja mereka.

Dalam wawancara terpisah, Mustajab mengakui bahwa dirinya yang meminta para petugas PJLP Suku Dinas SDA Jakarta Pusat ke kediamannya di Perumahan Radiance Villa, Bekasi.

Bersamaan dengan itu, ia meminta maaf dan mengakui salah karena mengerahkan sejumlah pasukan biru untuk membersihkan selokan di luar area tugas di Jakarta Pusat.

“Saya mohon maaf atas ke-teledoran ini. Sekali lagi saya selaku PNS mohon maaf untuk semuanya,” ujar Mustajab. Mustajab juga mengakui teledor karena petugas yang dimintai bantuan membersihkan selokan di kompleksnya, masih mengenakan baju dinas Suku Dinas SDA Jakarta Pusat.

Meski begitu, Mustajab enggan berkomentar lebih jauh soal permasalahan yang menimpanya. Ia pasrah jika nantinya harus mendapat sanksi dari Heru Budi selaku pimpinannya. ● yan

Legislator Desak Pemprov DKI Segera Revitalisasi Rusunawa Marunda

JAKARTA (IM) - Atap Rusunawa Marunda di Jakarta Utara dikabarkan roboh lantaran kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Legislator mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera melakukan revitalisasi terhadap bangunan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan mengatakan, ambruknya atap rusunawa tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dalam upaya perawatan rusunawa di Jakarta. “Ini nyata kurangnya keseriusan DPRKP terhadap perawatan rusun. Pembangunan dan perawatan rusunawa seharusnya menjadi prioritas DPRKP, alih-alih fokus pada program DP Rp 0,” kata August dalam keterangannya, Selasa (5/9).

Meski insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, Pemprov DKI Jakarta melalui DPRKP DKI Jakarta diminta merespons cepat untuk melakukan revitalisasi bangunan rusunawa yang sudah tidak layak. Tak hanya bangunan Rusunawa Marunda, pengecekan juga perlu dilakukan rusunawa-rusunawa lainnya di Ibu Kota untuk mengantisipasi insiden serupa.

“DPRKP harus segera merevitalisasi bangunan, juga mengecek bangunan lain yang berpotensi roboh dan menceleki penghuninya. Tidak hanya revitalisasi, tapi DPRKP perlu merelokasi warga yang bangunannya akan dibetulkan oleh dinas,” ujar Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, August mengkritisi DPRKP DKI Jakarta yang dinilai tidak memiliki program prioritas yang fokus pada hal perumahan dan permukiman. Lagi-lagi dia menekankan pada program DP Rp 0 yang lebih dijadikan fokus.

“Program CAP (Community Action Plan) dan CIP (Collaborative Implementation Program) masih belum sempurna pelaksanaannya, ditambah lagi DPRKP report dengan urusan rumah DP Rp0 yang sebenarnya sudah bisa dianggap gagal serta kurang dimintai warga DKI,” tegas dia.

Sebelumnya dikabarkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum mengatakan, atap atau dak beton Rusunawa Marunda roboh pada Rabu (30/8) pukul 21.10 WIB, tepatnya di Blok C5 lokasi sekitar halaman (hall) belakang.

Retno mengemukakan robohnya atap bangunan di Blok C Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, akibat sudah tidak layak huni. “Sesuai hasil penelitian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) bahwa bangunan tersebut sudah tidak layak,” kata Retno saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Warga Blok C Rusunawa Marunda yang tercatat sebanyak 451 Kartu Keluarga (KK) akan direlokasi ke Rusunawa Nagrak pada September 2023. “Pada Kamis, 31 Agustus 2023 disosialisasikan bahwa warga segera dipindahkan ke Rusun Nagrak. Warga juga sudah mulai mengangkut barangnya secara bertahap,” kata Retno.

Selain itu, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II Dinas PRKP DKI Jakarta, Uye Yayat Dimiyati menyebutkan, beberapa lokasi bangunan juga sudah sangat membahayakan.

Uye menjelaskan, sosialisasi untuk relokasi itu sudah dilaksanakan pada Maret 2022. Namun sempat tertunda karena adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Rusun Nagrak sebagai tempat relokasi digunakan untuk isolasi pasien Covid-19.

“Sudah dari tahun lalu kita ‘plan’ (susun), warga yang sebagian sulit dipindah. Yang sekarang lebih tegas karena mengutamakan keselamatan jiwa,” ujar Uye. ● yan



PENYEMPROTAN AIR MENGGUNAKAN WATER MIST GENERATOR
Pekerja menyemprotkan air menggunakan water mist generator di Kantor Walikota, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (5/9). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba pompa bertekanan tinggi (water mist generator) untuk menekan polusi udara di Jakarta.

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type, Color & Year	Tax	Transmission	Police Number
1	SUZUKI RS415 SWIFT ST 4x2 MERAH METALIK 2010	12/12/2022	MT	R 8969 YC
2	TOYOTA ETIOS 1.2 E PUTHIH 2016	10/09/2022	M/T	B 2251 SKZ
3	NISSAN Grand Livina 1.5 XV/ABU METALIK 2010	14/09/2022	A/T	N 1833 FI
4	NISSAN SERENA ABU ABU METALIK 2008	14/09/2022	A/T	B 1329 PV
5	SUZUKI RS415 SWIFT ST 4x2 HITAM METALIK 2010	31/05/2023	MT	N 1611 FF
6	SUZUKI DR412 (4x2) SPLASH MERAH 2014	12/05/2023	M/T	B 1929 TMH
7	NISSAN Evalia 1.5 4X2 MERAH 2013	07/08/2023	MT	F 1735 MF
8	NISSAN Grand Livina 1.5 SV (4x2) MERAH TUA 2015	21/10/2023	M/T	N 1563 AAO
9	NISSAN Pajero SP25DGLS 4X2 PUTHIH MUTIARA 2010	24/06/2023	MT	H 1058 IW
10	TOYOTA NEW AVANZA 1.3G KUNING METALIK 2012	29/09/2023	M/T	N 1104 GH

Bila ada cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 14 September 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual dan di perhitungkan kembali.

Hormat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670